



**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN
INFRASTRUKTUR BERSUMBER DANA DESA DI DESA TRISOBO
KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL**

Skripsi

**disusun sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan**

UNNES
Oleh
Chairul Wahid Kurniawan
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1201412071

**PENDIDIKAN NON FORMAL
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Infrastruktur Bersumber Dana Desa di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal" karya,

Nama : Chairul Wahid Kurniawan

NIM : 1201412071

Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah

Telah dipertahankan dalam sidang panitia ujian skripsi Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Semarang pada hari Kamis 9 Juni 2016

Semarang, 9 Juni 2016

Panitia Ujian



Ketua

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si
NIP. 196807042005011001

Sekretaris

Dr. Tri Suminar, M.Pd
NIP. 196705261995122001

Penguji I

Prof. Dr. Joko Sutarto, M.Pd
NIP. 195609081983031003

Penguji II

Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si
NIP. 196807042005011001

Penguji Pembimbing

Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd
NIP. 197911302006041005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "*Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Dana Desa di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*" telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian

Skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 1 Juni 2016

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah

Semarang, 1 Juni 2016
Pembimbing



Dr. Utsman, M.Pd

NIP. 195708041981031006

Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd

NIP. 197911302006041005

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi ini benar-benar karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya ini.

Semarang, 9 Juni 2016

Yang membuat pernyataan,

A 6000 Rupiah Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'PETERAI TEMPEL', '77ADF708553291', and '6000 RUPIAH'.

Chairul Wahid Kurniawan

NIM. 1201412071

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Hargailah semua proses dalam kehidupan maka kita akan senantiasa selalu berusaha dan bekerja keras

Saat kita terjatuh maka cepatlah untuk berusaha bangkit lagi dan segera memperbaiki keadaan



Dengan segala kerendahan hati, Saya persembahkan skripsi ini kepada:
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
Para pembaca yang berkesempatan membaca karya ini
Teman-teman almamater yang telah memberi kritik dan saran dalam penyusunan skripsi ini.

ABSTRAK

Kurniawan, Chairul Wahid. 2016. Partisipasi Masyarakat Dalam Program Pemberdayaan Infrastruktur Bersumber Dana Desa Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pemberdayaan dan Dana Desa

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat maupun daerah agar tercipta kesejahteraan sosial. Namun kenyataannya program pemberdayaan yang di kelola belum mengikutsertakan masyarakat. Karena permasalahan yang terjadi pada program pemberdayaan yang berimbas pada kurangnya partisipasi masyarakat membuat pemerintah sebagai otoritas tertinggi negara melakukan upaya membuat suatu program pemberdayaan melalui Dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur melalui mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi beserta hal-hal pertimbangan dasar yang dijadikan dalam melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana Desa di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian yaitu masyarakat serta informan yaitu pemerintah desa dan pelaksana program. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Prosedur penelitian ini dibagi dalam empat tahap yaitu persiapan, pelaksanaan, analisis dan penulisan laporan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Trisobo meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan berupa usulan dalam kegiatan di musyawarah. Bentuk partisipasi masyarakat tahap pelaksanaan berupa sumbangantenaga saat kerja bakti. Sedangkan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi berupa pengawasan berupa saran dan masukan kepada pemerintah desa dan pelaksana program. Hal-hal pertimbangan dasar yang dijadikan dalam partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kepemimpinan dari pemerintahan Desa Trisobo.

Simpulan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat di Desa Trisobo meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Hal-hal pertimbangan dasar yang dijadikan dalam melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur yaitu usia, pendidikan, pekerjaan, pengalaman dan kepemimpinan dari pemerintahan Desa Trisobo. Saran yang dapat diberikan kepada pemerintah desa yaitu perlunya diadakan rapat inti pemerintah desa serta perlu adanya peningkatan pengadministrasian. Sedangkan pengelola yaitu perlu dibuat penginformasian yang jelas berupa papan informasi atau mading saat pelaksanaan program pemberdayaan. Saran untuk masyarakat perlu terlebih dahulu belajar mengenai Dana Desa agar dalam pengelolaan program mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi lebih dapat berkontribusi.

Abstract

Kurniawan, Chairul Wahid.2016. Public Participation in infrastructure Empowerment Program Sourced Dana Desa In the village of the District Trisobo Boja Kendal . Essay. Non-formal education majors, State University of Semarang. Supervisor: Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd.

Keywords : Public Participation , Empowerment and Dana Desa

National development aims to increase the potential of the community and local levels in order to create social welfare. But the reality is empowerment in governance not involving the community. Due to problems that occurred in the empowerment programs which impact on the lack of community participation makes the government as the highest state authorities to make efforts to create a program of empowerment through Dana Desa. This study aimed to describe community participation in infrastructure development program through the start of the planning, implementation and evaluation along with the things that dijadikan basic consideration in the involvement of the community in infrastructure development programs sourced Dana Desa Trisobo in the Village District of Boja Kendal.

This study uses qualitative research. Subject of research is the community and village government informants and program implementers. Data were collected through interviews , and documentation . Technique authenticity of data using triangulation techniques and resources. The procedure of this study is divided into four stages: preparation, implementation, analysis and writing research reports.

The results showed that the participation of the villagers Trisobo includes participation in planning, implementation and evaluation. Forms of community participation in the planning stages in the form of the activity proposed in the consultation. Forms of public participation phase of implementation in the form of donated labor time voluntary work. While participation in the evaluation stage form of supervision in the form of advice and feedback to the village level and implementing the program. The things that made the basic considerations of community participation in infrastructure development programs are age, education, occupation, experience and leadership of the village government Trisobo.

Conclusions from this research is the participation of the community in the village of Trisobo includes the planning, implementation and evaluation. The things that dijadikan basic considerations in the involvement of the community in infrastructure development programs are age, education, occupation, experience and leadership of the village government Trisobo. Advice can be given to village government, namely the need for core government meeting held villages as well as an improvement in the administration. While the manager that needs to be made clear penginformasian current form or Mading information board during the implementation of the empowerment program. Suggestions for the community needs to first learn about Dana Desa so in the management of the program start of planning , deploy and evaluation can contribute.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis panjatkan karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang membahas tentang Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana desa di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu atas bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan juga kepada semua pihak yang telah membantu selama proses penyelesaian studi, diantaranya:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan menyelesaikan studi strata 1 Jurusan Pendidikan Luar Sekolah.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNNES yang telah memberikan kesempatan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan masukan dalam penelitian skripsi ini.
4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Unnes, yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan.
5. Pemerintah Desa yang telah memberikan izin penelitian di Desa Trisobo.
6. Warga masyarakat Desa yang dengan tangan terbuka terlibat dalam penelitian ini.
7. Teman-teman Jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNNES angkatan 2012.
8. Bapak,ibu,serta keluarga yang selalu memberi semangat, sabar mendampingi, dan memotivasi penyelesaian studi.
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan pengetahuan.

Semarang, 9 Juni 2016



Chairul Wahid Kurniawan



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Penegasan Istilah.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Partisipasi Masyarakat	11
2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat.....	11
2.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat	13

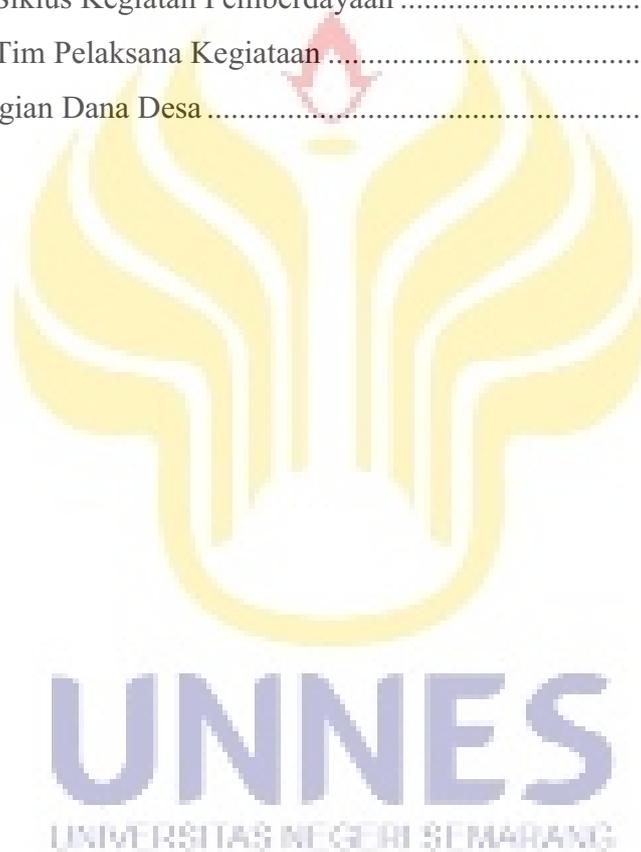
2.1.3 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Partisipasi Masyarakat.....	15
2.2 Pemberdayaan Masyarakat	18
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	18
2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat.....	20
2.2.3 Indikator Keberdayaan.....	21
2.2.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat.....	21
2.2.5 Proses Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.3 Infrastruktur	25
2.3.1 Jenis-Jenis Infrastruktur	26
2.4 Dana desa.....	27
2.3.1 Pengertian Dana desa.....	27
2.3.2 Tujuan Penggunaan Dana desa.....	27
2.3.3 Prinsip Penggunaan Dana desa.....	28
2.3.4 Model Pengelolaan Dana desa.....	30
2.3.5 Kerangka Berpikir	35
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian.....	37
3.2 Latar Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian	38
3.4 Subjek Penelitian.....	38
3.5 Sumber Data	39
3.6 Metode Pengumpulan Data.....	40
3.7 Keabsahan Data	42
3.8 Teknik Analisis Data	44
 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	47
4.2 Pembahasan	71

BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran	82
DAFTARPUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	88



DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Rencana Waktu Penelitian	39
4.1 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Trisobo	48
4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Trisobo	48
4.3 Tabel Siklus Kegiatan Pemberdayaan	49
4.4 Tabel Tim Pelaksana Kegiatan	54
4.5 Pembagian Dana Desa	54



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Berpikir	36
3.1 Skema Triangulasi Sumber	43
3.2 Skema Triangulasi Metode	43
3.3 Skema Analisis Data	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Kisi-kisi Wawancara Pemerintah Desa.....	89
2. Kisi-kisi Wawancara Pelaksana Program	91
3. Kisi-kisi Wawancara Masyarakat	93
4. Catatan Lapangan 1	95
5. Catatan Lapangan 2.....	109
6. Catatan Lapangan 3.....	114
7. Catatan Lapangan 4.....	119
8. Catatan Lapangan 5.....	134
9. Catatan Lapangan 6.....	141
10. Catatan Lapangan 7.....	148
11. Catatan Lapangan 8.....	164
12. Catatan Lapangan 9.....	167
13. Rekapitulasi Data Hasil Penelitian.....	176
14. Dokumentasi	183
15. Daftar Absen Musyawarah Desa.....	186
16. Berita Acara Musyawarah Desa.....	187
17. Surat Penelitian	188
18. Surat Keterangan Penelitian.....	189

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan upaya peningkatan potensi masyarakat maupun daerah. Upaya pembangunan nasional dapat dilakukan melalui berbagai program pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) yang ada agar tercipta kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial di lingkup daerah dapat diukur dari pembangunannya yang dapat dilakukan dengan program pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pembangunan berfungsi untuk merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Hal ini sesuai pernyataan dari Beratha (1982 :65) menyatakan bahwa pembangunan suatu bangsa adalah suatu usaha raksasa dari bangsa itu, untuk mencapai kesejahteraan sosial setiap warga negara dan bangsa tersebut. Pembangunan nasional yang berorientasikan pada pemberdayaan secara langsung dan tidak langsung dapat memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat dapat memandirikan masyarakat apabila program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Pembelajaran pada masyarakat yang dimaksud adalah program pemberdayaan dapat memberikan keterampilan maupun memberikan informasi atau pengetahuan baru kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan Utsman (2010: 29) mengatakan proses belajar pemberdayaan masyarakat yaitu suatu upaya penyadaran dan pembentukan perilaku menuju peningkatan kapasitas diri serta mampu bertaransformasi menjadi lebih

baik. Selain berorientasikan pada masyarakat pemberdayaan yang baik adalah apabila program pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga dilibatkan secara penuh pada implikasi program pemberdayaan.

Namun kenyataan yang terjadi, program pemberdayaan masih belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Oekan dalam Maulana (2015: 1) bahwa pemerintah sudah berkomitmen mendukung pembangunan nasional melalui program-programnya dan sebenarnya pemerintah Indonesia sudah merencanakan pembangunan berkesinambungan sejak dulu, tetapi implementasi yang kurang mengakibatkan kurang maksimalnya program pembangunan pemerintah. Namun implementasi dilapangan masih belum terjadi. Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah merencanakan pembangunan berkesinambungan sejak dulu.

Salah satu upaya pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan pembangunan yaitu melalui program pemberdayaan masyarakat. Program tersebut memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensinya atau yang disebut otonomi daerah. Hal ini terdapat pada UU No.22 dan 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah bahwa:

“Pemerintah daerah di tuntut untuk siap mendapat delegasi kekuasaan dari pemerintah pusat untuk mengelola pemerintahanya serta mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.”

Pernyataan tersebut semakin mempertegas bahwa pemerintah daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan. Otonomi daerah membuat setiap masyarakat harus berpartisipasi dalam proses pemberdayaan. Menurut Usman (2010: 12)

pemberdayaan merupakan prioritas utama dalam pembangunan masa depan. Salah satu upaya pembangunan yang harus dilakukan adalah melalui kontribusi riil dari daerah. Kontribusi daerah sangat diharapkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan proses pembangunan dari tingkat dasar atau daerah dan aspirasi masyarakat daerah. Hal ini dapat menjadi sumber prioritas dari program daerah itu sendiri. Pernyataan tersebut menyiratkan bahwa program pemberdayaan pada suatu daerah memerlukan partisipasi masyarakat yang merupakan hal utama dalam pengelolaan program pemberdayaan. Hal ini juga didukung oleh hasil penelitian dari Pius (2013: 2) bahwa kunci keberhasilan dan keberlanjutan program *Feeding Programme in Primary Schools* yang berada di Embarkasi negara Kenya adalah partisipasi dari masyarakat dan juga *stakeholder* dalam mengelola program pemberdayaan. Hal ini membuktikan bahwa keberlanjutan akan tercapai mengingat keterlibatan yang memadai dari masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan bukan hanya partisipasi pada proses pelaksanaan, melainkan juga partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada partisipasi masyarakat pada tahap pengawasan. Soetomo (2008: 440) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah seluruh keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi. Pernyataan tersebut mempertegas bahwa keterlibatan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan yang berupa pembangunan di kota maupun desa.

Dewasa ini program pemberdayaan yang ada pada masyarakat hanya sebagai pelengkap kewajiban pemerintah pusat maupun daerah kepada rakyatnya. Hal tersebut terlihat dari kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan dimana masyarakat kurang bisa merasakan kebermanfaatannya. Program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan apabila kegiatan program tersebut masih berlangsung dan jika program selesai maka partisipasi masyarakat. Hal ini sering terjadi pada program pemberdayaan masyarakat yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain karena program pemberdayaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat alasan lain tidak maksimalnya program pemberdayaan adalah pembuat kebijakan kurang memperhatikan kondisi lapangan. Kebijakan pemerintah dalam memberikan program pemberdayaan masih bersifat gaya lama yaitu kebijakan *top-down* atau pemerintah memberikan kebijakan berdasarkan analisis pemerintah itu sendiri.

Kebijakan pemerintah yang bersifat *top-down* masih kurang tepat sasaran. Masyarakat hanya menjadi objek bukan menjadi subjek pemberdayaan, akibatnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan masih sangat kurang. Soetomo (2008: 7-8) mengatakan bahwa pembangunan sosial lebih menekankan pada pendekatan proses bukan pada hasil, pendekatan proses yaitu memanusiakan manusia dalam proses pembangunan dengan cara partisipasi masyarakat pada pengelolaannya. Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat masih kurang dalam program pemberdayaan yang berorientasikan pada pembangunan sosial yang ada di Indonesia baik di kota maupun di pedesaan

Pemerintah sedang melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan pada pedesaan melalui program pemberdayaan infrastruktur. Program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dalam bidang infrastruktur. Salah satu program yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan masyarakat adalah bersumber dari Dana desa yang di berikan oleh pemerintah pusat. Dana desa merupakan program pemerintah Republik Indonesia melalui Kementrian Dalam Negeri yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang berorientasikan partisipasi masyarakat dalam pengelolaanya serta berbasis pada pembangunan mental dan fisik. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pada pasal 1 yang menjelaskan Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota (APBD) dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan program yang bersumber Dana desa harus melibatkan partisipasi masyarakat karena masyarakat merupakan subjek dalam program pemberdayaan. Besaranya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan akan memberikan efek positif bagi proses dan hasil program pembangunan. Soetomo (2009: 355) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam program akan memberikan dampak positif bagi proses pembangunan masyarakat menjadi tidak tergantung kepada program pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi

masyarakat sangat penting dalam Dana desa karena dinilai turut menunjang keberhasilan program.

Selain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan upaya pemerintah dalam penyaluran Dana desa kepada pemerintah desa untuk mengelola segala potensi Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM).. Namun, yang terpenting dalam pengelolaan sumber daya sumber daya yang ada adalah sumber daya manusianya, karena dengan pengelolaan sumber daya manusia dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Pembelajaran ini dapat berfungsi sebagai sumber pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dana desa pada hakekatnya merupakan terusan program dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilaksanakan sejak tahun 2007 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Melalui program pemberdayaan infrastruktur sumber Dana desa, pemerintah berusaha menarik partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan dan melaksanakan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat setempat serta dapat memelihara kelangsungan program tersebut sehingga berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dianggap hal penting karena diduga memiliki hubungan yang kuat dalam mencapai efektivitas program. Desa Trisobo merupakan salah satu desa yang pada tahun 2014 mendapatkan program pemberdayaan melalui Dana desa. Penggunaannya di Desa Trisobo periode pertama di gunakan untuk program pemberdaan pada bidang infrastruktur.

Infrastruktur yang dimaksud adalah meliputi pembangunan jalan dan perbaikan fasilitas masyarakat seperti aula desa, masjid dan sekolah khususnya di desa Trisobo

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan program pemberdayaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan merupakan salah satu indikasi keberhasilan pengelolaannya. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Suwandi (2014: 3) yang mengatakan partisipasi masyarakat yang menjadi faktor keberhasilan program pemberdayaan PNPM. Selain dilihat keberhasilan program dari partisipasi masyarakatnya dapat pula dilihat dari hasil program yaitu meningkatnya infrastruktur desa dalam ini jalan dan fasilitas publik.

Perlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan merupakan salah satu bentuk perwujudan dari pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Masyarakat menjadi subjek pemberdayaan bukan hanya objek pemberdayaan semata. Kedudukan sebagai subjek pemberdayaan berarti anggota masyarakat hendaknya memiliki kemauan, kemampuan, kesediaan, kesadaran, motivasi, kerjasama dan kawasan yang kuat dan melekat pada diri anggota masyarakat terhadap pemberdayaan. Kedudukan anggota masyarakat tersebut dapat diartikan pula bahwa anggota masyarakat harus berperan secara aktif, didorong untuk berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat, baik dalam menyusun perencanaan maupun dalam implementasi proyek atau program pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tentang pentingnya partisipasi pada program pemberdayaan infrastruktur , penulis ingin meneliti partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur yang bersumber Dana desa di Desa Trisobo.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut.

- 1.2.1 Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastrukturbersumberDana desadi Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?
- 1.2.2 Hal apa saja yang di jadikan pertimbangan dasar partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastrukturbersumberDana desadi Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1.3.1. Mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastrukturbersumberDana desadi Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- 1.3.2. Mendeskripsikan hal-hal yang di jadikan pertimbangan dasar partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastrukturbersumberDana desadi Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1.4.1. Manfaat Teoritis

1.4.1.1. Menambah khasanah ilmu pengetahuan, pada Pendidikan Luar Sekolah khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat.

1.4.1.2. Bagi penulis sendiri penelitian dapat menambah pengetahuan tentang pentingnya program pemberdayaan masyarakat melalui Dana desa.

1.4.2. Manfaat Praktis

1.4.2.1. Bagi Masyarakat

Dapat digunakan oleh masyarakat sebagai salah satu sumbangan pengetahuan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.4.2.2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam pengambilan suatu kebijakan terutama dalam bidang pemberdayaan masyarakat, khususnya pada program Pemberdayaan Masyarakat melalui Dana desa.

1.5. Penegasan Istilah

1.5.1 Partisipasi

Partisipasi atau "*participation*" adalah keikutsertaan individu secara fisik dan emosional dalam kelompok serta melakukan kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok (Newstron 2007: 182).

1.5.2 Pemberdayaan Masyarakat

Adisasmita (2006: 35) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (a) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (b) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (c) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas dan efisiensi).

1.5.3 Infrastruktur

Giggs dalam Ariesta (2014: 37) mengatakan infrastruktur adalah sistem fisik terdiri dari transportasi, pengairan, drainase, jalan dan fasilitas lainnya yang di butuhkan untuk memnuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun ekonomi.

1.5.4 Dana desa

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana desa Tahun 2015 Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Dana desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Partisipasi Masyarakat

2.1.1 Pengertian Partisipasi Masyarakat

Partisipasi adalah keterlibatan aktif seseorang untuk berkontribusi secara sukarela dalam kegiatan. Hal ini sesuai yang dikemukakan oleh Newstron (2007: 182) yang mengatakan partisipasi atau "*participation*" adalah keikutsertaan individu secara fisik dan emosional dalam kelompok serta melakukan kontribusi untuk mencapai tujuan kelompok. Menurut Mikkelsen (1999: 64) partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu. Berdasarkan pendapat ahli dapat disimpulkan partisipasi adalah keikutsertaan individu secara fisik dan emosi yang aktif dalam kelompok serta melakukan kontribusi sesuai dengan inisiatif dan kemampuan individu tersebut..

Masyarakat adalah sekumpulan individu yang mendiami suatu tempat, saling berhubungan, dan berorganisasi. Menurut Slamet (2004 :83) masyarakat sama dengan "*community*" yang artinya sekelompok individu berjumlah besar maupun kecil yang hidup bersama sehingga mereka merasakan bahwa kelompok tersebut memenuhi kepentingan hidup yang utama. Sedangkan menurut Soekanto (1982: 46) masyarakat adalah sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah pada kurun waktu yang lama dan membuat peradaban. Menurut Suharto (2010:

47) masyarakat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan sama atau menyatu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan-kepentingan yang sama, perasaan memiliki dan biasanya satu tempat yang sama. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh ahli maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah sekelompok individu yang mendiami suatu wilayah dengan waktu tertentu sehingga terjadi perasaan dan kepentingan yang sama.

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan sekelompok individu secara sadar, aktif, dan sukarela dalam suatu kegiatan sosial. Menurut Adisasmita (2006: 34) mengemukakan partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang di kerjakan di dalam masyarakat lokal. Sedangkan menurut Soetomo (2008: 439-440) mengatakan partisipasi masyarakat adalah suatu keterlibatan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembagunan yang mulai dari pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan program, pelaksanaan program serta dalam evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: (1) partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal (2) bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan

mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut (3) bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri. Berdasarkan pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat secara sadar, aktif, sukarela, dan mandiri pada suatu program pemberdayaan atau pembangunan yang di mulai sejak identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai pada tahap pengawasan sampai dengan tindak lanjut program.

2.1.2 Bentuk Partisipasi Masyarakat

Bentuk keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam mengikuti suatu pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Suwandi (2015: 10) dalam penelitiannya mengatakan beberapa bentuk-bentuk partisipasi yang dilakukan dalam suatu pembangunan daerah yaitu (1) Partisipasi masyarakat pada proses perencanaan, keikutsertaan masyarakat desa secara umum melalui forum musyawarah, yaitu melalui Musrebangdes. (2) Partisipasi masyarakat pada proses pelaksanaan, keikutsertaan masyarakat pada pelaksanaan pembangunan yang direncanakan sebelumnya. (3) Partisipasi masyarakat pada proses pengawasan, masyarakat berpartisipasi untuk menjaga jalannya kegiatan pembangunan agar sesuai dengan yang telah direncanakan dan menjaga hasil pembangunan tersebut.

Uphoff, et.al (1979: 51) membagi partisipasi ke dalam beberapa jenis tahapan, yaitu: (1) Tahap perencanaan, melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang merencanakan program pembangunan berupa menyusun rencana kerjanya. (2) Tahap pelaksanaan, masyarakat ikut terlibat langsung yang jujur nyata

partisipasi pada tahap pelaksanaan ini dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu partisipasi dalam bentuk sumbangan pemikiran, bentuk sumbangan materi, dan bentuk keterlibatan sebagai anggota proyek. (3) Tahap menikmati hasil, yang dapat dijadikan indikator keberhasilan partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan pelaksanaan proyek. Selain itu, dengan melihat posisi masyarakat sebagai subjek pembangunan, maka semakin besar manfaat proyek dirasakan, berarti proyek tersebut berhasil mengenai sasaran dan (4) Tahap evaluasi, masyarakat memberikan umpan balik dan dapat memberi masukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Menurut Teraik Kogoya, et.al (2015: 13) dalam penelitiannya yang berjudul "Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Di Kabupaten Lanny Jaya-Papua" mengemukakan bentuk partisipasi diantaranya (1) Partisipasi dalam perencanaan bentuk kegiatan yang dilakukan masyarakat memberikan saran/usulan, (2) Partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan terdiri atas sumbangan tenaga, dana, dan material (3) Bentuk partisipasi masyarakat dalam tahap pemeliharaan adalah bentuk sumbangan tenaga dan uang.

Robert (2001: 103-104) mengatakan beberapa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat diantaranya : (1) *Public hearing* adalah pertemuan dengan publik secara formal dan biasanya diperlukan berdasarkan hukum atau peraturan, (2) *Public meeting* adalah pertemuan dengan publik secara informal untuk membahas isu yang timbul, (3) Presentasi didepan publik adalah ceramah (*lecture*) dan diskusi tentang topik yang khusus untuk menginformasikan sesuatu pada publik dan bertukar informasi, (4) Kunjungan lapangan (*site visit*) adalah ceramah

(*lecture*) dan diskusi tentang topik yang khusus untuk meningkatkan sensitive perencana dan penduduk pada dampak pekerjaan, (5) Badan pertimbangan atau penasehat penduduk adalah beberapa masyarakat yang secara resmi di tunjuk untuk mewakili untuk membuka kesempatan terjadinya komunikasi dua arah dengan suatu badan perwakilan dan untuk membantu memperoleh dukungan masyarakat.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa dalam jenis-jenis dalam partisipasi masyarakat secara umum ada 3 (tiga) macam yaitu (1) partisipasi masyarakat pada perencanaan program, adalah keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan program. Contoh kegiatan pada pertemuan masyarakat, musawarah desa, dll. (2) Partisipasi masyarakat pada pelaksanaan program adalah keikutsertaan masyarakat pada penerapan atau pelaksanaan program. Contoh kegiatan yaitu partisipasi uang, tenaga, maupun pikiran. (3) Partisipasi masyarakat pada evaluasi, adalah keikutsertaan masyarakat dalam menilai dan mengawasi kegiatan.

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi Masyarakat

Faktor faktor yang berhubungan dengan partisipasi masyarakat adalah hal-hal yang mempengaruhi keikutsertaan masyarakat dalam suatu program pemberdayaan atau pembangunan baik itu yang mempengaruhi secara positif maupun negatif. Adisasmita (2006; 134) mengatakan ada beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam partisipatif pembangunan pedesaan di antaranya Faktor-faktor pendukung meliputi : (1) Komitmen anggota masyarakat terhadap pembangunan partisipatif adalah kuat, rasa kebersamaa, kesadaran, dan

keikhlasan anggota masyarakat yang tinggi, (2) Sarana untuk menunjang pembangunan pembangunan partisipatif (tenaga, dana dan bahan), dan (3) Program kegiatan pembangunan partisipatif adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Faktor penghambat meliputi : (1) Sosialisasi pentingnya mengenai kegiatan partisipatif belum dilakukan kepada seluruh kelompok masyarakat, (2) Koordinasi kegiatan pembangunan partisipatif belum dilaksanakan secara positif, dan (3) Perumusan program dan kegiatan pembangunan partisipatif lebih merupakan daftar keinginan, bukan merupakan program dan kegiatan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.

Adapaun jurnal penelitian tentang “*Performance E-Government Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sidoarjo*” yang dilakukan oleh Abadi (2014: 243) mengemukakan ada beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur di Sidoarjo, yaitu karakteristik individu seperti umur, pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, dan *performance e-government*.

Kusuma, C et.al (2012 : 9) kurangnya pendidikan masyarakat sehingga aspirasi masyarakat cenderung bersifat pembangunan secara fisik (infrastruktur desa) seharusnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Selain itu Suroso et. al (2014: 4) faktor-faktor yang diduga mempengaruhi keaktifan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan dibedakan menjadi dua, yaitu faktor internal (terdiri dari usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat penghasilan penduduk, lamanya tinggal) dan faktor eksternal (terdiri dari komunikasi dan kepemimpinan).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Novia (2015: 8) mengemukakan bahwa usia dapat menjadi faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat karena semakin matang usia maka pemahaman akan semakin baik. Selain itu Faisal et.al (2013: 8) partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor penghasilan dan faktor peran konsultan perencana, sedangkan tingkat partisipasi masyarakat sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan dan faktor penghasilan.

Robert (2001: 102) mengatakan ada beberapa hal yang mempengaruhi dalam partisipasi masyarakat ada 2 (dua) yaitu (1) Tahap Pre-planning, diantaranya terdapat bagaimana merencanakan skope program atau kegiatan, isu-isu yang menjadi permasalahan (*concern*) dari publik perlu diidentifikasi, studi tentang masyarakat, dan detail informasi dari rencana kegiatan. (2) Kebijakan institusi diantaranya mencakup tentang sumberdaya, jangkauan atau jaringan , komunikasi yang efektif, teknik dan respons.

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan secara garis faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat yaitu (1) faktor internal, adalah faktor-faktor yang terdapat pada setiap diri manusia seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan dan tingkat pendidikan masing-masing individu. (2) faktor eksternal, adalah faktor-faktor yang terdapat pada luar diri manusia seperti tingkat kepekaan masyarakat dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

2.1 Pemberdayaan masyarakat

2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu usaha atau upaya sadar untuk meningkatkan kemampuan atau mengubah suatu kondisi. Hal ini serupa apa yang diungkapkan oleh Sulistiyani (2004: 79) pemberdayaan adalah suatu upaya rangkaian kegiatan untuk membangun masyarakat, dengan cara memberikan suatu dorongan, motivasi agar dapat membangkitkan kesadaran serta mau mengembangkannya potensi yang dimiliki, sedangkan menurut jurnal penelitian internasional dari Rita Nengsih et.al (2015: 12) yang berjudul *“The Effectiveness Of Urban Independent Community Empowerment Program (PNPM) In Tackling Poverty In Indonesia”* yang mengatakan *“Empowerment is a continuous effort that is done by creating a process that can deliver the poor towards an independent community”* yang berarti Pemberdayaan adalah upaya terus menerus yang dilakukan dengan membuat sebuah proses yang dapat memberikan miskin menuju masyarakat yang mandiri.

Menurut Suharto (2010: 59) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah suatu serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok lemah dalam hal ini masyarakat yang kurang mampu (miskin) dalam lingkup masyarakat. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan adalah suatu keadaan ingin mencapai suatu perubahan masyarakat yang berdaya, dan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan fisik, ekonomi, maupun sosial seperti mempunyai kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai pekerjaan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial.

Sedangkan menurut Utsman (2010: 17) memberikan empat pengertian tentang pemberdayaan masyarakat yaitu (1) pemberdayaan dimaknai dalam konteks menempatkan posisi berdirinya masyarakat yang mengartikan bahwa masyarakat sebagai objek pemberdayaan bukan sebagai subjek (2) pemberdayaan secara prinsipil berurusan dengan upaya memenuhi kebutuhan masyarakat yang artinya bahwa pemberdayaan sebagai upaya untuk memnuhi kebutuhan masyarakat (3) pemberdayaan terbentang dari proses sampai visi ideal yang artinya masyarakat merupakan otak atau penggerak dalam kegiatan sehingga masyarakat mempunyai kemandirian dan kemampuan dalam melakukan akses kontrol terhadap lingkungan, komunitas, sumberdaya dan relasi sosial politik dengan negara (4) pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktur masyarakat kolektif yang artinya pemberdayaan upaya membuat masyarakat memiliki pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol individu.

Menurut Adisasmita (2006: 35) mengatakan pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya masyarakat pedesaan secara lebih efektif dan efisien, baik dari (1) aspek masukan atau input (SDM, dana, peralatan/sarana, data, rencana dan teknologi); (2) dari aspek proses (pelaksanaan, monitoring dan pengawasan); (3) dari aspek keluaran atau output (pencapaian sasaran, efektifitas dan efisiensi).

Berdasarkan pernyataan diatas tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya mengembangkan potensi sumber daya yang tersedia di daerah baik secara sumber daya alam (SDA) maupun sumber

daya manusia (SDM), agar tercipta kebermanfaatan dalam kehidupan sosial dan individu sehingga masyarakat memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daerah.

2.2.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan pemberdayaan adalah harapan yang ingin di capai dalam suatu program pemberdayaan yang dimana harapan tersebut dapat menumbuh kembangkan masyarakat menjadi mandiri dan sejahtera. Sulistiyani (2004; 80) mengatakan bahwa tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk suatu individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat yang di maksud adalah suatu keadaan masyarakat yang mampu menyelesaikan masalah dengan mempergunakan kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, afektif dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan masyarakat tersebut.

Menurut Suharto (2010: 60) mengatakan tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat masyarakat yang lemah atau tidak memiliki ketidakberdaya baik karena masalah internal (persepsi sendiri) maupun masalah eksternal (misalnya ditindas karena struktur sosial yang kurang adil). Sedangkan menurut Utsman (2010: 10) mengatakan tujuan pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri dalam berpikir, bertindak dan mengandalkan apa yang mereka lakukan. Widjaja (2002: 77) mengatakan tujuan dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membangkitkan segala kemampuan yang ada pada masyarakat untuk mencapai tujuan pertumbuhan motivasi, inisiatif, kreatif serta penghargaan dan pengakuan bagi mereka yang berprestasi.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan tujuan pemberdayaan adalah untuk memberikan penguatan kepada masyarakat baik dalam aspek, kognitif, psikomotorik, afektif dengan pengarahannya serta pembelajaran agar masyarakat memiliki motivasi, inisiatif, serta kreatif dalam mencapai kemandirian sosial.

2.2.3 Indikator Keberdayaan

Person et.al (1994: 106) yang dikutip oleh Suharto (2010: 60) mengajukan tiga dimensi yang merujuk pada: a) sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan yang lebih besar, b) sebuah kondisi psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain, c) pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisi orang-orang lemah dan melibatkan upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang menekan.

2.2.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Strategi pemberdayaan adalah cara yang digunakan untuk melakukan suatu proses pemberdayaan dalam mengembangkan masyarakat. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Suharto (2010: 66-67) mengemukakan tiga laras atau mata pemberdayaan (*empowerment setting*) yaitu (1) Aras mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management, crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau

melatih klien dalam menjalankan tugas kehidupannya. Model ini sering di sebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered aproache*). (2) Araz mezzo, pemberdayaan di lakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai media intervens. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran pengetahuan, keterampilan dan sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi. (3) Aras Makro, pendekatan ini di sebut juga sebagai strategi sistem besar (*large-system strtegy*), karena sasaranperubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen politik adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi–situasi mereka sendiri, dan untuk memiliki serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Suharto (1997: 218-219) mengemukakan beberapa strategi pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan yang di singkat dengan 5P yaitu (1) Pemungkinaan, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat. (2) Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menunmbuhkan-kembangkan segenap kemampuan dan dan kepercayaan diri masyarakat yang

menunjang kemandirian mereka. (3) Perlindungan, melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan tidak sehat antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. (4) Penyokongan, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. (5) Pemeliharaan memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

2.2.5 Proses Pemberdayaan Masyarakat

Proses pemberdayaan pada umumnya dilandasi pada upaya mengoptimalkan proses kegiatan. Sulistiyani (2004:118) mengemukakan proses adalah seluruh kegiatan/langkah-langkah secara bertahap yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan agen pembaharu, yang terdiri dari: (1) Pendekatan capacity building untuk memberdayakan kelembagaan agen pembaharu, (2) Pendekatan new public management (NPM) untuk meningkatkan kemampuan manajerial agen pembaharu secara internal, (3) Pendekatan kinerja untuk peningkatan kinerja organisasi agen pembaharu, (4) Pendekatan substansial melalui pengorganisasian

knowledge, attitude, practice (KAP) agar agen pembaharu menguasai aspek dan substansi kemiskinan, mampu menentukan solusi dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan kemandirian masyarakat.

Menurut Utsman (2010: 29) mengatakan ada beberapa tahap proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat, di antara lain (1) tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri (2) tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan (3) tahap peningkatan kemampuan intelektual, dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Sudjana (2003: 63), proses pembelajaran dalam upaya pemberdayaan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

2.2.5.1 Perencanaan

Perencanaan adalah suatu upaya yang terjadi pada awal kegiatan yaitu berupa menyusun rencana baik secara konsep maupun uraian. Perencanaan adalah upaya sistematis untuk penyusunan rangkaian atau tindakan yang akan dilakukan dalam pencapaian tujuan organisasi atau lembaga, selain itu fungsi perencanaan merupakan untuk menggerakkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah diharapkan (Sudjana 2003: 63). Menurut Sutarto (2008: 169) mengatakan perencanaan program pendidikan non formal/pemberdayaan masyarakat adalah suatu rangkaian kegiatan

yang sistematis dengan mendayagunakan komponen-komponen (*inputs, throughputs, outputs, outcome, impacts*)

2.2.5.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah upaya pengaplikasian rencana kegiatan yang sebelumnya telah di rencanakan. Sedangkan menurut Sudjana (2003: 63). Pelaksanaan adalah suatu proses kegiatan yang berawal dari implementasi awal, implementasi dan implementasi akhir. Implementasi awal kegiatan teknis yang mencakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan. Sedangkan implementasi akhir mencakup akhir tentang pelaksanaan kegiatan yang diantaranya mengenai hasil kegiatan dan pelaporan.

2.2.5.3 Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu kegiatan memberikan penilaian terhadap program yang sudah dilakukan. Hal ini sesuai apa yang di sampaikan oleh Suharto (2010: 119) evaluasi adalah pengidentifikasi keberhasilan atau kegagalan suatu rencana kegiatan atau program. Sedangkan menurut Sutarto (2010: 181) mengatakan evaluasi program pembelajaran/pemberdayaan masyarakat adalah usaha pengumpulan dan penjajagan informasi untuk mengetahui dan memutuskan cara yang efektif dalam menggunakan berbagai sumberdaya yang tersedia guna mencapai tujuan pembelajaran/pemberdayaan secara keseluruhan.

2.3. Infrastruktur

2.3.1. Pengertian Infrastruktur

Infrastruktur merupakan alat-alat fisik yang bersifat umum yang terdapat pada lingkungan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Asnudin

(2014: 3) menyatakan infrastruktur pedesaan merupakan infrastruktur yang bersifat dan memberikan akses terhadap pelayanan dasar maupun pelayanan sosial serta ekonomi bagi masyarakat pedesaan. Hal yang sama juga di dukung oleh Giggs dalam Ariesta (2014: 37) mengatakan infrastruktur adalah sistem fisik terdiri dari transportasi, pengairan, drainase, jalan dan fasilitas lainya yang di butuhkan untuk memnuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun ekonomi.

Berdasarkan pendapat ahli dapat di simpulkan bahwa infrastruktur adalah sisitem fisik terdiri dari jalan, transportasi, pengairan dan fasilitas lain yang bersifat memberikan akses kepada masyarakat baik kebutuhan dasar, sosial maupun ekonomi.

2.3.2. Jenis-jenis infrastruktur

Jenis infrastruktur merupan suatu bentuk dari fasilitas masyarakat yang berfungsi utuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Zafar dan Areff membagi infrastruktur ke dalam beberapa yaitu jalan, transportasi, pengairan, drainase dll. Sedanagkan berdasarakan World Bank dalam Prasetyo et.al (2009: 5) membagi infrastruktur ke dalam 3 jenis yaitu, (1) infrastruktur ekonomi adalah infrastruktur yang di gunakan untuk menunjang keperluan ekonomi, seperti pelabuhan, jalan, rel, lapangam terbang dan sebagainya (2) infrastruktur sosial meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi, (3) infrastruktur Aministrasi meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi, dan koordinasi.

Berdasaekan pendapat ahli dapat di simpulkan bahwa jenis infrastruktur fisik yang terdapat 3 jenis yaitu infrastruktur ekonomi berupa transportasi,

bandara dan tempat yang digunakan untuk kegiatan ekonomi, infrastruktur sosial seperti pendidikan, dan kesehatan. Sedangkan infrastruktur terakhir yaitu infrastruktur administrasi seperti penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

2.4. Dana desa

2.4.1. Pengertian Dana desa

Dana desa adalah dana yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada aparaturn pemerintahan desa yang digunakan untuk operasional pemerintahan desa dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota (APBD) dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.4.2. Tujuan Penggunaan Dana desa

Tujuan penggunaan Dana desa terdapat pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa Tahun 2015 pasal 11 yang berisi bahwa dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk pemberdayaan masyarakat desa yang khususnya untuk menanggulangi

kemiskinan dan untuk peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan Rencana Penggunaan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa di antaranya : (1) Peningkatan kualitas proses perencanaan Desa, (2) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik (BUM) desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya, (3) Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, (4) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa, (5) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat, (6) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, (7) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok yang ada pada masyarakat desa.

Hasil penelitian tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana desa” yang dilakukan oleh Syahrul Syamsi (2014: 25) mengatakan tujuan dari penggunaan Dana desa adalah (1) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, (2) Mempercepat Pembangunan Fisik Maupun Non fisik Desa, (3) Meringankan Beban keuangan Desa, dan 4) Menunjang kehidupan dan oprasional Desa.

2.4.3. Prinsip Penggunaan Dana desa

Dana desa pada dasarnya merupakan salah satu dana atau keuangan desa yang pada prinsipnya di kelola oleh pemerintah desa. Secara langsung menunjukkan bahwa anggran Dana desa merupakan keuangan dari pemerintah desa Keuangan desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 pasal 2

tentang pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa prinsip pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan yang berwenang untuk mengatur segala keuangan desa. Pengaturan keuangan desa juga memerlukan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pertimbangan Kepala Desa dalam pengambilan keputusan kebijakan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No 113 pasal 3 tentang pengelolaan keuangan desa yang mengatakan bahwa (1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan.

Pelaksanaan keuangan desa yang dalam hal ini tentang Anggaran Dana desa pada prioritas pelaksanaannya juga di gunakan sebagai pemabangunan. Pembangunan ini mencakup pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah atau desa. Hal ini tercantum pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No.5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa pasal 3 yang berisi prioritas penggunaan Dana desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui (1) Pemenuhan kebutuhan dasar, (2) Pembangunan sarana dan prasarana Desa, (4) Pengembangan potensi ekonomi lokal, (4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

2.3.4. Model Pengelolaan Dana desa

Pentapan penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat di atur dalam Permandes No.5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa pasal 11 yang berbunyi penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi sesuai dengan perencanaan desa. Hal tersebut dapat menegaskan bahwa dana desa pada hakikatnya di gunakan untuk kebutuhan masyarakat baik dalam segi penggunaan untuk pengentasan kemiskinan dan dalam segi pengelolaannya. Berdasarkan Permendagri no.144 tahun 2014 pengelolaan dana desa mencakup beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

2.3.4.1 Perencanaan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di dusun, di desa, dan di kecamatan. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari Musyawarah Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebangdes ini diawali dari Musyawarah Dusun (Musdus), pada Musdus akan dilaksanakan oleh RT, RW Kepala dusun (Kadus), dan masyarakat. Musdus akan menghasilkan sebuah kesepakatan yang itu dimana akan di bawa pada Musyawarah Pembangunan Desa (Musrebangdes). Musrebangdes ini dilaksanakan oleh panitia musyawarah desa yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Musrebangdes dihadiri oleh Kepala Desa (Kades) beserta perangkat, dan unsur masyarakat seperti tokoh agama, adat, kelompok masyarakat, dll. Musrebangdes membahas aspirasi yang telah

dilaksanakan pada Musdus dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMdes). Saat musrembangdes kepala desa juga mensinkronkan aspirasi masyarakat dengan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP). Setelah terjadi kesepakatan musyawarah desa, pemerintah desa dan juga masyarakat secara bersama membahas tentang teknis pelaksanaan dan Rancangan Anggaran Belanja (RAB). Pemerintah desa pada musrembangdes saat telah terjadi kesepakatan membuat Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

2.3.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan adalah tahap pelaksanaan seluruh rencana yang telah disepakati dalam pertemuan musrembangdes serta rapat-rapat persiapan pelaksanaan diantaranya membahas (1) Penyaluran Dana dan Pencairan Dana, Desa menyediakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDana desaes) yang dimana pengaturan dan kesepakatan pada APBDana desaes telah disepakati bersama oleh masyarakat, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, kesepakatan itu menghasilkan undang-undang desa. Undang-undang desa ini sebagai pedoman untuk penggunaan dana pada APBDana desaes termasuk mengatur tentang pencairan dana untuk RAB yang disepakati saat musrembangdes, (2) Pengadaan Tenaga Kerja, TPK mengumumkan adanya rencana pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat dan kebutuhan tenaga kerjanya, serta upah dan hari kerja yang dibutuhkan sesuai RAB dan desain teknisnya. Pengumuman kebutuhan tenaga kerja ini terbuka bagi warga desa termasuk bagi kaum perempuan dan diutamakan bagi Rumah Tangga Menengah (RTM). Pengumuman disampaikan melalui papan informasi di tempat strategis dimana

masyarakat biasa berkumpul, sehingga setiap warga masyarakat tahu bahwa ada pembangunan di desanya. Calon tenaga kerja mengisi Format Pendaftaran satu kali sebelum mulai bekerja, akan tetapi boleh mendaftarkan diri sampai pelaksanaan selesai. Calon tenaga kerja diutamakan warga desa setempat, (3) Pengadaan bahan dan alat, Proses pengadaan bahan dan alat dilaksanakan oleh TPK secara transparan. Atas persetujuan masyarakat, TPK menyelenggarakan proses pengadaan tersebut dan melaporkan setiap tindakannya kepada masyarakat melalui forum pertemuan masyarakat dan papan informasi. TPK menentukan toko/penyedia mana yang dipilih berdasarkan harga termurah dengan kualitas dan spesifikasi sesuai yang direncanakan. Hasil survey dan penentuan toko/penyedia mana yang dipilih harus disampaikan dalam forum pertemuan masyarakat dan papan informasi.

2.3.4.3 Pengawasan

Kegiatan semua yang dilaksanakan baik dalam perencanaan dan pelaksanaan harus mengikutsertakan masyarakat. Pemerintah desa dalam hal ini memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat tentang perkembangan kegiatan. Pemberian informasi ini berdasarkan kesepakatan antara pemerintah desa, masyarakat dan TPK. Setiap pemberian perkembangan kegiatan harus di lampirkan bukti berupa dokumen, dan foto. Pengawasan ini menyangkut tentang teknis pelaksanaan dan pengawasan terhadap sarana prasarana yang digunakan TPK saat kegiatan. Pihak TPK harus memberitahukan semua tindakan yang dilakukan maupun rencana yang akan dilakukakan. Pemberitahuan dapat menggunakan papan informasi maupun sosialisasi kepada masyarakat.

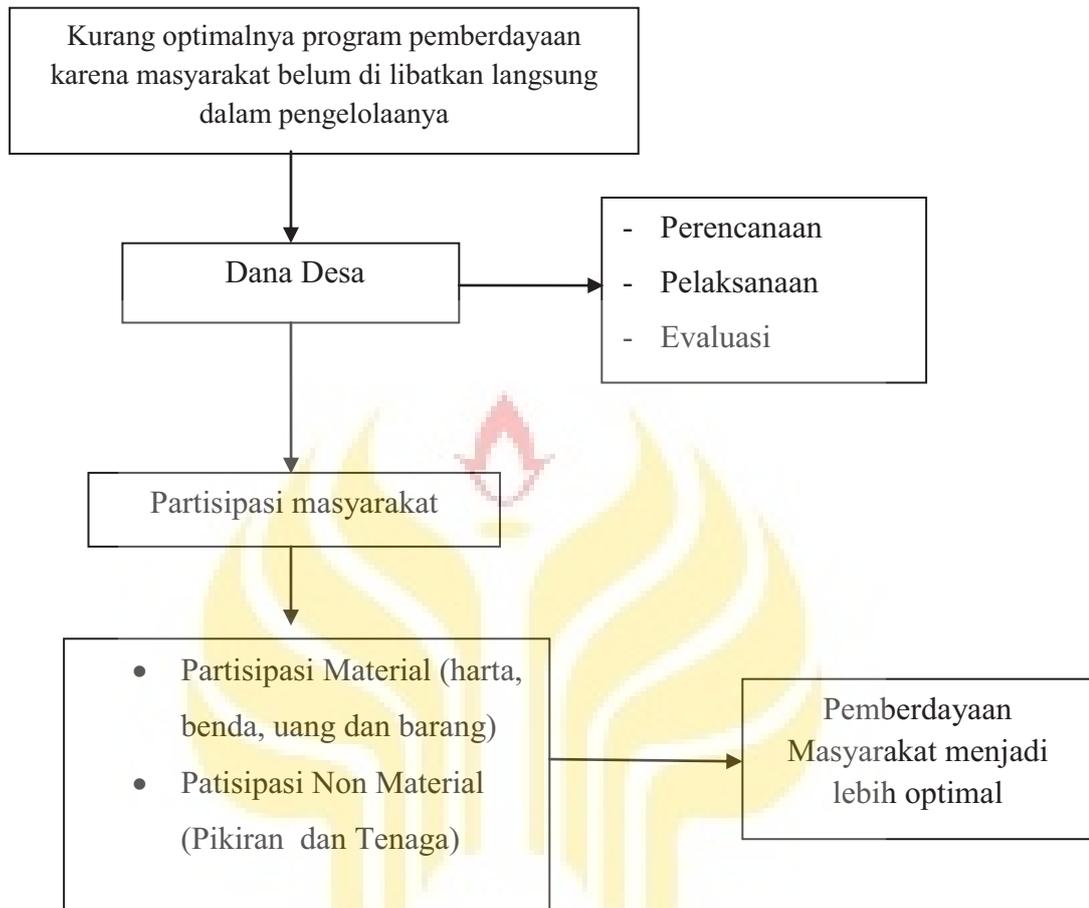
2.3.5. Peyelesaian kegiatan

Penyelesaian kegiatan yang dimaksud disini adalah penyelesaian dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban TPK di desa. Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan dan diselesaikan, meliputi: (1) Pembuatan laporan penyelesaian pelaksanaan kegiatan, Laporan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan (LP2K) memuat pernyataan bahwa kegiatan telah selesai dilaksanakan (100%) serta siap diperiksa oleh Kepdes. Untuk laporan LP2K ditandatangani oleh Kepala TPK. Pada saat LP2K ditandatangani, seluruh administrasi baik pertanggungjawaban dana maupun jenis administrasi lainnya sudah dilengkapi dan dituntaskan, termasuk Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB). LP2K yang sudah ditandatangani diserahkan pada pemerintah desa dengan tembusan kepada Kepdes untuk ditindaklanjuti berupa pemeriksaan di lapangan, (2) Realisasi kegiatan dan biaya (RKB), Di dalam realisasi kegiatan dan biaya dibuat secara terpisah antara setiap kegiatan. Realisasi Kegiatan dan Biaya (RKB) harus dibuat sesuai dengan kondisi terlaksana di lapangan dan menunjukkan target akhir dari pelaksanaan kegiatan di desa. Harga-harga satuan, volume, jumlah, besarnya, dan distribusi dana dari setiap kegiatan di luar prasarana harus berdasar kepada kondisi aktual di lapangan dan sesuai dengan catatan yang ada pada buku kas umum. Harus dihindari sikap yang hanya menyalin atau menulis ulang RAB awal tanpa melihat realisasi yang setelah terjadi di lapangan. Pembuatan RKB hanyalah merekap atau merangkum seluruh catatan penggunaan dana dan pelaksanaan kegiatan yang dibuat selama pelaksanaan. Jika terdapat kontribusi swadaya masyarakat selama periode pelaksanaan, perlu dicantumkan dalam RKB.

RKB merupakan bagian penting dan tak terpisahkan dari LP2K, sehingga harus sudah dapat diselesaikan sebelum LP2K ditandatangani. RKB akan banyak manfaatnya untuk menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat pemeriksaan. Pada kegiatan pembangunan prasarana perincian volume dan biaya yang tercantum pada format RKB harus sesuai dengan lapangan dan berkaitan erat dengan gambar-gambar setelah pelaksanaan yang juga merupakan lampiran dalam dokumen penyelesaian. Gambar-gambar yang dilampirkan dalam dokumen penyelesaian, yaitu denah, peta situasi, detail konstruksi dan gambar lain-lain yang juga merupakan bagian dari RKB, harus dibuat sesuai dengan kondisi yang ada atau terlaksana di lapangan.. Jika terjadi perubahan di lapangan, di samping dilakukan perubahan pada gambar juga harus dituangkan dalam berita acara revisi, (2) Musyawarah desa serah terima (mdst), MDST merupakan bentuk pertanggungjawaban kegiatan oleh TPK kepada masyarakat setelah pekerjaan/kegiatan selesai dilaksanakan. Tujuan musyawarah ini untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari sehingga hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil MDST dituangkan dalam berita acara. Jika hasil pelaksanaan kegiatan yang disampaikan TPK belum dapat diterima oleh MDST, TPK diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dan dokumen yang dipersyaratkan, yang akan disampaikan melalui MDST berikutnya sesuai dengan kesepakatan masyarakat, pemerintah desa, dan tim pelaksana kegiatan (TPK).

2.4 Kerangka Berpikir

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat maupun daerah melalui program pemberdayaan dengan memanfaatkan sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) yang ada agar tercipta kesejahteraan sosial. Pembangunan Nasional tersebut di implementasikan dengan program pemberdayaan salah satunya di bidang infrastuktur. Namun kenyatannya program pemberdayaan yang di kelola pemerintah mengalami banyak permasalahan. Permasalahan ini terjadi karena faktor dari dalam pemerintah tidak mengikutsertakan masyarakat di dalam pengelolaanya akibatnya program pemberdayaan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan program yang kurang maksimal. Selain itu akibat akibat dari permasalahan implementasi program yang tidak maksimal membuat partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan juga rendah. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan juga berimbas kepada hasil program yang dapat di kategorikan kurang berhasil. Karena permasalahan yang terjadi pada program pemberdayaan melalui Dana desa. Hakikat dari pelaksanaan program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana desa adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pengelolaannya. Secara singkat kerangka berfikir akan di gambarkan pada bagan di bawah ini :



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan data yang di peroleh dan analisis yang telah dilakukam, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut,

5.1.1. Partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana desa di Desa Trisobo meliputi partisipasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan yaitu dengan memberikan usulan dalam kegiatan di musyawarah baik di tingkat dusun mapun desa. Salah satu usulan yang di berikan masyarakat pada kegiatan musyawarah yaitu usulan pembagunan infrastruktur berupa pembangunan jalan, kanal dan perbaikan jembatan. Bentuk partisipasi masyarakat tahap pelaksanaan yaitu memberikan bantuan tenaga saat kerja bakti dalam program pembangunan infrastruktur. Sedangkan partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi berupa pengawasan kegiatan program pemberdayaan masyarakat yaitu dengan memberika saran dan masukan kepada pemerintah desa dan pelaksana program.

5.1.2. Hal-hal yang di jadikan pertimbangan dasar partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana desa di Desa Trisobo yaitu hal intern dari masyarakat dan hal ekstern dari masyarakat. Hal intern dari masyarakat meliputi usia, pendidikan, pekerjaan, dan pengalaman. Sedangkan, Hal ekstern dari masyarakat adalah

kepemimpinan dari pemerintahan Desa Trisobo karena dalam program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana desa pemerintah desa menjadi pemegang kekuasaan.

5.2. **Saran**

5.2.1. Pemerintah Desa Trisobo

Pemerintah Desa Trisobo yang terdiri dari kades beserta jajarannya, LPMD, dan BPD perlu ada pertemuan khusus dan rutin pada hari tertentu untuk membahas tentang pengelolaan Dana Desa agar saat menyampaikan informasi kepada masyarakat tidak berbeda-beda. Selain itu pemerintah Desa Trisobolebih meningkatkan pengadministrasian arsip-arsip baik mengenai Dana Desa yaitu laporan pertanggung jawaban pada masyarakat maupun pemerintah pusat. Selain itu untuk pemerintah desa di harapkan dalam sosialisasi awal tidak hanya saat kegiatan masyarakat yaitu tahlil dan selapanan, perlu adanya pertemuan yang khusus di luar kegiatan masyarakat agar pertemuan benar-benar fokus membahas tentang program pemberdayaan infrastruktur bersumber Dana Desa.

5.2.2. Tim Pelaksana Program

Tim pelakasan program dalam musyawarah harus lebih tanggap dalam menyampaikan informasi dari pemerintah desa kepada masyarakat berupa di buatkan suatu *power point* saat pemaparan. Kemudian saat pelaksanaan program pembangunan infrastruktur TPK membuat papan informasi atau mading yang berisi laporan pembayaran atau penggunaan dana supaya lebih transparan.

5.2.3. Masyarakat

Masyarakat saat musyawarah harus lebih interaktif yaitu salah satunya lebih banyak bertanya dan memberikan usulan terhadap kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pemerintah desa. Masyarakat juga sebelum mengikuti pengelolaan Dana Desa perlu belajar terlebih dahulu tentang hal tersebut agar usulan lebih beraneka ragam, tidak hanya mengusulkan pembangunan jalan, talut dan sebagainya. Masyarakat perlu meningkatkan pengawasan dalam program pemberdayaan bersumber Dana Desa dengan cara memberikan saran lisan dan tertulis terhadap kebijakan pemerintah yang kurang tepat seperti tidak ada jadwal jelas mengenai musyawarah serta saat pelaksanaan kegiatan pemerintah desa lebih dominan daripada masyarakat. Keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yaitu pembangunan infrastruktur tidak hanya memberikan sumbangan tenaga saja tetapi sumbangan ide dan material perlu di tingkatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi et.al. 2014. Performance E-Government Untuk Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 4: No3.
- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ariesta, F A. 2014. Membangun Desa melalui Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP) di Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis*.
- Arikunto, S. 2010. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Beratha, N. 1982. *Desa Masyarakat dan Pembangunan Desa*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Chandra, et.al. 2013. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 6: No 12
- Christien A dan Puspita D. 2015. Identifikasi Faktor Utama yang Berpengaruh pada Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Coblong Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*. Vol 4: No 5.
- Conyers, D. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Darmawi, E. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) Di Desa Talang Leak I Kecamatan Bingin Kuning Kabupaten Lebong. *Jurnal Penelitian Sosial dan Politik*. Vol 3: No 1.
- Faisal et.al. 2013. Analisis Partisipasi Masyarakat Lhokseumawe Dalam Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Lhokseumawe. *Jurnal Teknik Sipil*. Vol2 : No. 1
- Isbandi, R A. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Kusuma, C et.al. 2012. Pengelolaan Alokasi Dana desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik* . Vol 1: No. 6.

- Kodoatie, R J. 2002. *Pengelolaan Sumber Daya Air Dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maulana, A. 2015. Isu Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia Masih Sebatas Retorika. <http://www.unpad.ac.id/2015/09/isu-pembangunanberkelanjutan-di-indonesia-masih-sebatas-retorika/>. Di akses pada tanggal 9 Februari 2016 pukul 12.31 WIB.
- Maulina, A S. 2012. Identifikasi Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Sampah di Kecamatan Cimahi Utara serta Faktor yang Mempengaruhinya. *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota*. Vol 23: No 6
- Mikkelsen, B. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L J. 2007 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Newstrom, John W. 2007, *Organizational Behavior*, Boston: McGraw Hill.
- Novia. 2015. partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan program alokasi dana desa (studi di Desa Semongan Kecamatan Nyan Kabupaten Sanggau). *Jurnal Ilmu sosiatri*. Vol 4: No 3
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang pengelolaan keuangan desa, PP No. 113 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri tentang pengelolaan Dana desa, Permendagri No.144 tahun 2014
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa, Permendes No. 5 Tahun 2015
- Pius, K J. 2013. An Assessment of Community Participation in the Sustainability of School Feeding Programme in Primary Schools: A Case of Embakasi, Kenya. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. Vol 3: No. 9.
- Prasetyo, et.al. 2009. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*. Vol 2: Hal 222-236.
- Raharjo, et.al. 2013. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana desa (ADD) Tahun 2011 Di Desa Jembul Dan Desa Sumengko Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Administrasi Publik*. Vol 16: No 1.

- Republik Indonesia. 1999. Undang – Undang No.22 dan 25 tentang Otonomi Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 1999, No. 60. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rita Nengsih et.al. 2015. The Effectiveness Of Urban Independent Community Empowerment Program (Pnpm) In Tackling Poverty In Indonesia. *Journal of Asian Scientific Research*. Vol 5: No 6.
- Rizal A. 2014. Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*. Vol 4: No 51.
- Robert M dan Jackson.H.. 2001, Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta : . PT Raja Grafindo
- Teraik Kogoya et.al. 2015. Partisipasi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur jalan desa di kabupaten lanny jaya-papua. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*.Vol 15: No 2.
- Santoso, S. 2004. *Dinamika kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Satori, D A K. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Slamet, J S. 2004. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Sudjana, D. 2003. *Sistem dan Manajemen (Teori dan Aplikasi)*. Bandung: Falah Production.
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suharto, E. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suroso et.al. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Banjaran Kecamatan Driyorejo Kabupaten Gresik. *Jurnal Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi*. Vol 17:No 1
- Suwandi. 2015. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana desa Di Kantor Desa Suka Damai Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*. Vol 3: No 4.
- Soekanto, S. 1982. *Sosiologi suatu pengantar*: Jakarta. PT Raja Grafindo

- Soetomo. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soetomo. 2008. *Strategi – Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model - Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Syamsi, S. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol 3: No 1.
- Syaifun et.al, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Prasarana Lingkungan Melalui Program Dana Hibah Khusus (Suatu Kajian Bantuan Dana Pendesaan di Kecamatan Kandis Kab. Siak). *Jurnal ilmu lingkungan*. Vol 7: No 1
- Uphoff, et.al. 1977. *Rural Development Participation*. Cornell University. NewYork.
- Usman, S. 2010. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Utsman et.al. 2010. *Model-model pemberdayaan masyarakat desa di Provinsi Jawa Tengah*. Semarang: Widya Karya
- Wijaya, HAW. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Surat Keterangan Penelitian Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KANTOR KEPALA DESA TRISOBO
KECAMATAN BOJA

Alamat : Jl. Tulang Bawang

SURAT KETERANGAN

Nomor: 571/09/121/2014

Dasar : Surat dari Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang nomor : 169/UN37.1.1/KM/2016 tanggal 30 Maret 2016 perihal ijin penelitian.

Atas dasar surat diatas, Pemerintah Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Chairul Wahid Kurniawan
 NIM : 1201412071
 Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Semarang
 Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah

Yang bersangkutan telah selesai mengadakan penelitian di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal untuk menyusun skripsi dengan judul **"Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan Melalui Dana Desa Di Desa Trisobo Kecamatan Boja Kabupaten Kendal"**.

Waktu Penelitian : 30 Maret s.d 7 Mei 2016

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

UNNES
 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Kendal, 7 Mei 2016

